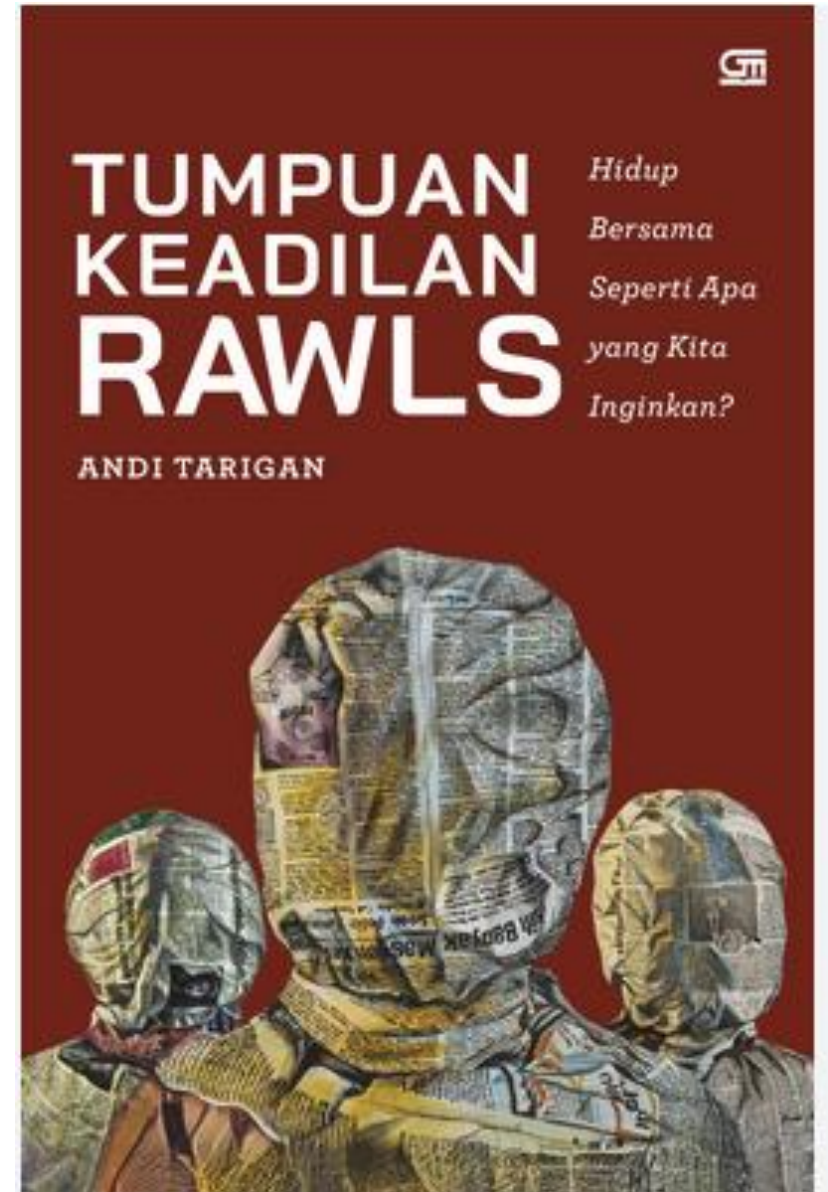


Tumpuan Keadilan Rawls:

**Hidup bersama seperti
apa yang kita inginkan?**



Tentang Buku

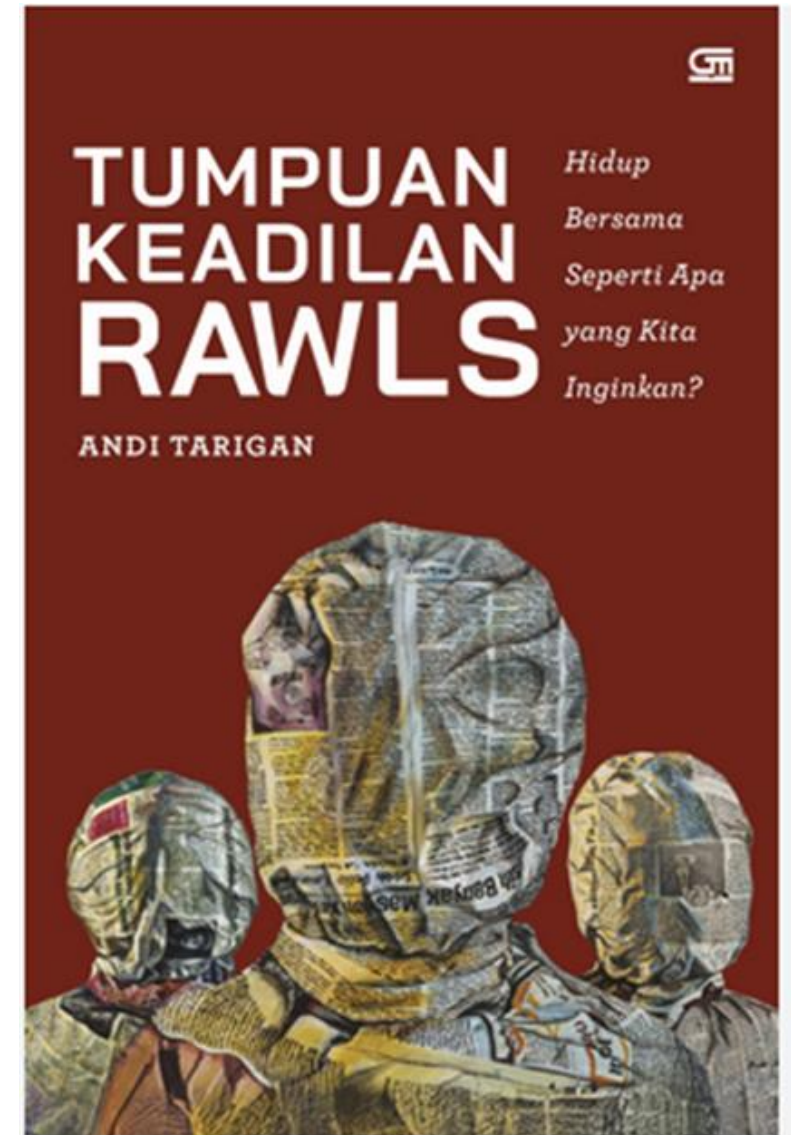
Judul : Tumpuan Keadilan Rawls:
Hidup bersama seperti apa
yang kita inginkan?

Penulis: Andi Tarigan

Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

Edisi: Cetakan ke-3

Fisik: 217 hlm. ; 21 cm



ANDI TARIGAN

Lulus dari Seminari Wacana Bhakti dan SMA Kolese Gonzaga. Setelahnya, ia melanjutkan studi ke jenjang berikutnya dan meraih gelar Sarjana Sastra (S.S.) dan Magister Filsafat (M.Fil.), keduanya dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Dua penelitian dalam bidang ilmu filsafat yang berhasil dituntaskannya menjurus pada tema filsafat politik, yaitu "signifikansi politik Kiri dan Kanan" serta "kontrak sosial dan teori keadilan". Beberapa karya tulisnya yang sudah dipublikasikan: "Postmodern Plato" (Basis 11–12), "Aku Belum Berpikir" dalam Semesta Cerita Kita (Gramedia Pustaka Utama, 2019), dan "Ya Sudah" dalam Nyala yang Tak Pernah Padam (Gramedia Pustaka Utama, 2025).

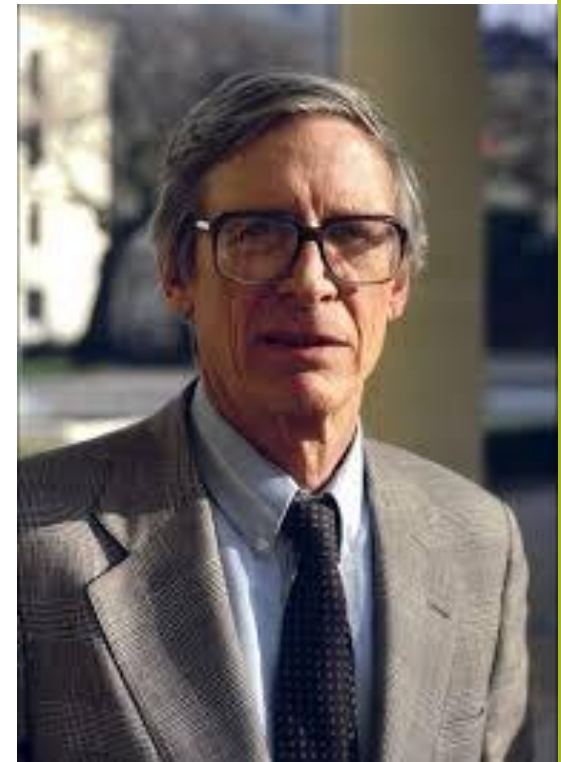


Siapa John Rawls?

- Lahir di Baltimore, Maryland, pada 21 Februari 1921.
- Pendidikan di Universitas Princeton dan meraih gelar Ph.D. di bidang Filsafat Moral pada 1950.
- Mengajar di Universitas Cornell dan MIT, sebelum bergabung dengan Universitas Harvard pada 1962 hingga pensiun.
- Pemikiran Utama: Melalui A Theory of Justice (1971), Political Liberalism (1993) dan The Law of Peoples (1999).

Michael Sandels (Kritikus Rawls):

Pemikiran Rawls sangat berpengaruh dan mendalam, dengan cakupan yang sangat luas dalam filsafat politik.... Di sisi lain, pemikirannya menyisakan lebih dari satu perdebatan yang serius (hal. 5-6).



Mengapa Membahas Teori Keadilan Rawls?



Indonesia masih berjuang mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi dan memperkuat demokrasi.



Dalam perspektif iman Kristen, teori keadilan Rawl sangat menarik karena keduanya bertemu pada satu titik sentral: keberpihakan pada mereka yang lemah ("Option for the poor")

Apa 'Adil' itu?

Adil sama rata, tidak berat sebelah, tidak memihak, setara sejajar dengan justice (kata sifat yg menerangkan Keputusan)

Dalam konteks Visual: keadilan digambarkan dalam Dewi Themis dengan membawa pedang di tangan kanan dan teraju di tangan kiri

Keadilan: dipahami sebagai kategori ganjaran (retributif)

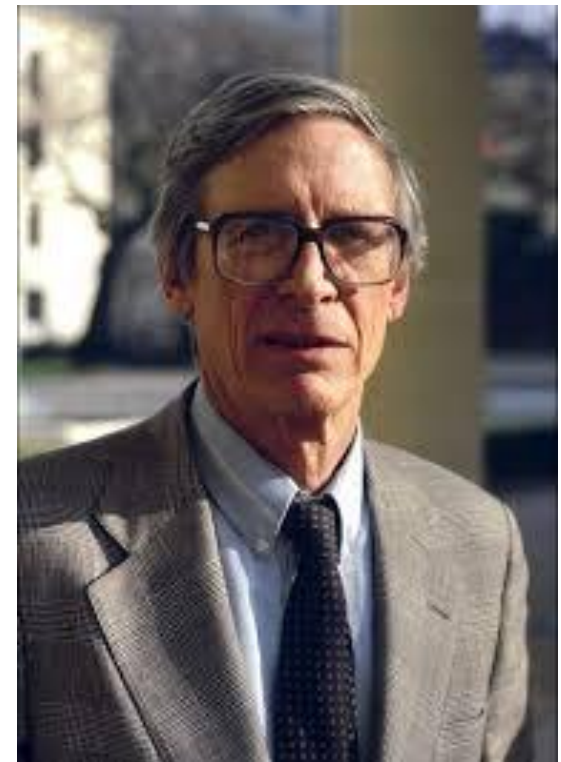
Keadilan: putusan/keadaan yang dirasa menyenangkan (bermanfaat) bagi semua orang (utilitarianisme)

Keadilan: sifatnya sebaran (distributif) → bicara tentang mekanisme/prosedur pembagian sumber daya

Teori Keadilan John Rawls: Justice as Fairness

“Apa yang hendak saya usahakan adalah menggeneralisasi dan mengabstraksikan teori kontrak sosial sebagaimana diungkapkan Locke, Rousseau, dan Kant. Dengan cara itu saya berharap dapat mengembangkan teori tersebut [keadilan sebagai kesetaraan] sehingga tidak terbuka lagi penolakan-penolakan yang nyata-nyata ingin menyangkalnya. Lebih dari itu, teori ini tampaknya memberikan penilaian yang sistematis tentang keadilan yang menurut saya lebih superior daripada tradisi utilitarianisme yang telah sedemikian mendominasi” (hal.xxi).

- Ide: Kontrak Sosial
- Mengatasi Kelemahan Utilitarianisme
- Menciptakan Sistem Keadilan yang Lebih Tangguh dengan keadilan sebagai kesetaraan (Justice as Fairness yang dibangun di atas posisi asali)

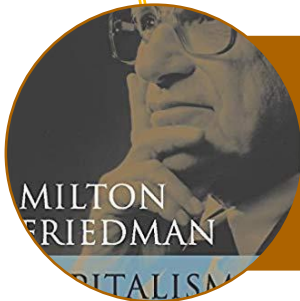


Keadilan Sebagai Problem Filosofis



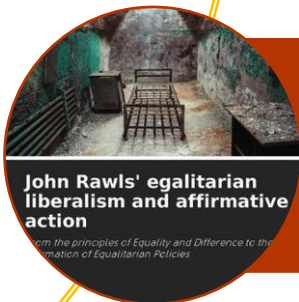
The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation

Utilitarian: Kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Kritik Rawls: Utilitarianisme berbahaya karena bisa menghalalkan pengorbanan hak individu atau minoritas demi kepuasan mayoritas.



MILTON FRIEDMAN
CAPITALISM

Libertarian: Penghargaan tertinggi pada kebebasan individu. Milton Friedman: Hidup ini tidak adil, pemerintah tidak perlu campur tangan untuk mengintervensi.



John Rawls' egalitarian liberalism and affirmative action

Liberalisme – egalitarian: keadilan hanya dapat dicapai dan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

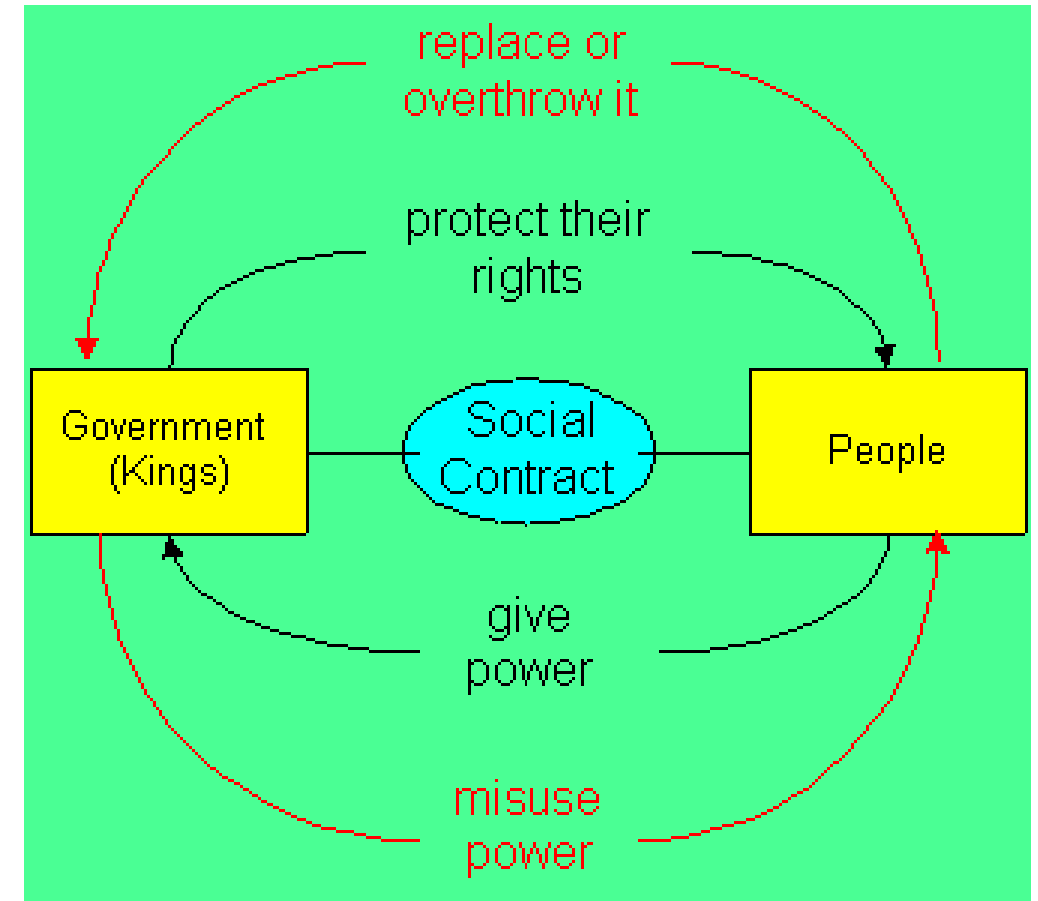
Rawls:

Keadilan adalah keutamaan pertama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam suatu sistem pemikiran → Keadilan sebagai kesetaraan bukanlah pertama-tama sebagai uraian deskriptif, melainkan tentang prosedur dan prinsip-prinsip untuk mencapai keadilan.

“Masyarakat sebagai komunitas politik, yang terdiri atas sejumlah orang dengan segala ragam perbedaan dan latar belakangnya, dapat dikelola dan diselenggarakan dengan cara terbaik jika, dan hanya jika, setiap orang yang menjadi bagiannya memiliki kemampuan epistemik untuk melepaskan diri dari segala kecenderungan, keinginan, kepentingan, dan kehendaknya, untuk kemudian secara bersama-sama menyepakati prinsip-prinsip keadilan yang bebas dari konsepsi moralitas tertentu” (hal.14-15)

Kontrak Sosial

Bagaimana
terbentuknya dan
justifikasi otoritas
negara?



Filsuf	Gambaran kondisi alami	Sifat dasar manusia	Alasan membentuk negara
Hobbes	Perang semua vs semua, kacau	Egois, takut mati, ingin kuasa	Untuk menghindari kehancuran dengan otoritas absolut
Locke	Damai, teratur oleh hukum akal	Rasional, berhak hidup–kebebasan–properti	Untuk menyelesaikan sengketa dan menjamin hak dengan negara terbatas
Rousseau	Bebas, baik, sederhana, damai	Alami dan jujur, tidak jahat	Untuk mempertahankan kebebasan asli dalam komunitas politik yang disepakati bersama
Kant	State of nature sebagai keadaan pranegara yang belum tertata hukum	Makhluk rasional yang berkewajiban moral	Untuk menegakkan negara hukum universal yang melindungi kebebasan berdasar moralitas

Ringkasan hal.16-58

Pertanyaan mendasar setelah mengkaji teori-teori kontrak sosial Hobbes, Locke, Rousseau, Kant:

“Bukankah setiap orang, dalam kesepakatan atau perjanjian apa pun, ingin diperlakukan secara adil? Inilah fokus yang tidak dapat dipisahkan (selain mengenai asal usul negara dan otoritasnya) dari kajian filsafat politik. Bagaimana kemudian Rawls menggunakan 'kontrak hipotetis' (sebagaimana yang digunakan para teoretikus kontrak sosial) untuk melampaui utilitarianisme dan menggagas 'keadilan sebagai kesetaraan' (justice as fairness)? Bagaimana dengan menggunakan perangkat eksperimen pikiran (experimental thought) Rawls sampai pada teori keadilannya?” (hal. 60)

Memahami metodologi filsafat keadilan Rawls harus berpijak pada teori kontrak sosial dan kritik Rawls terhadap utilitarianisme.

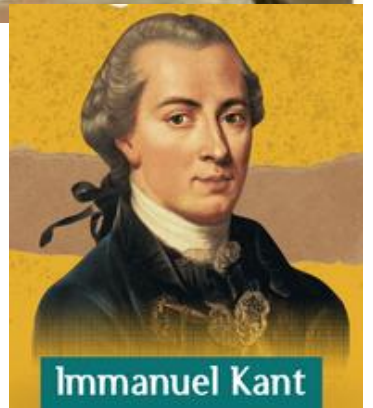
Thomas Hobbes



John Locke

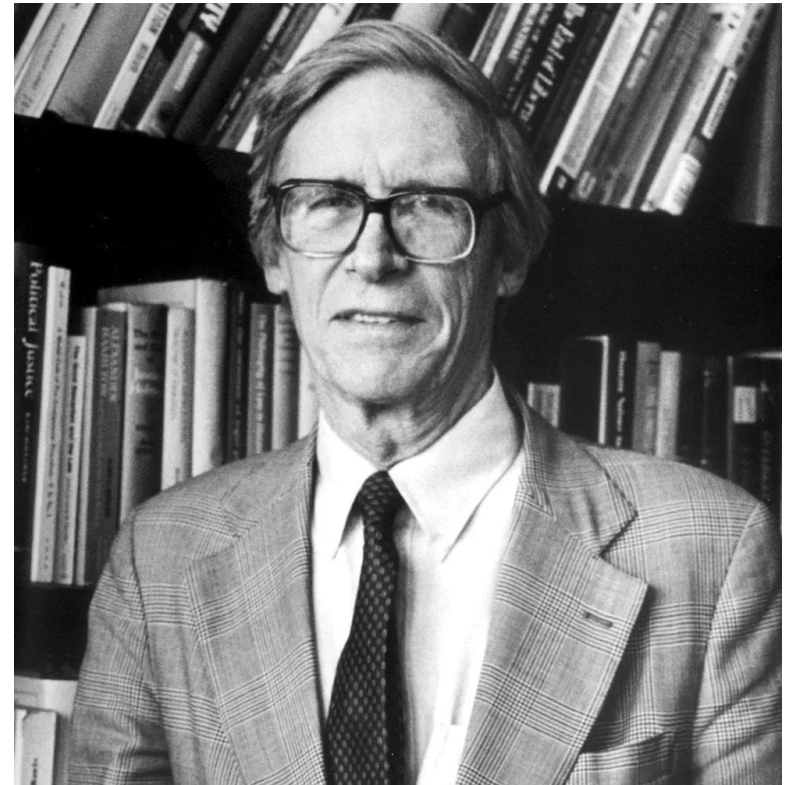


Rousseau



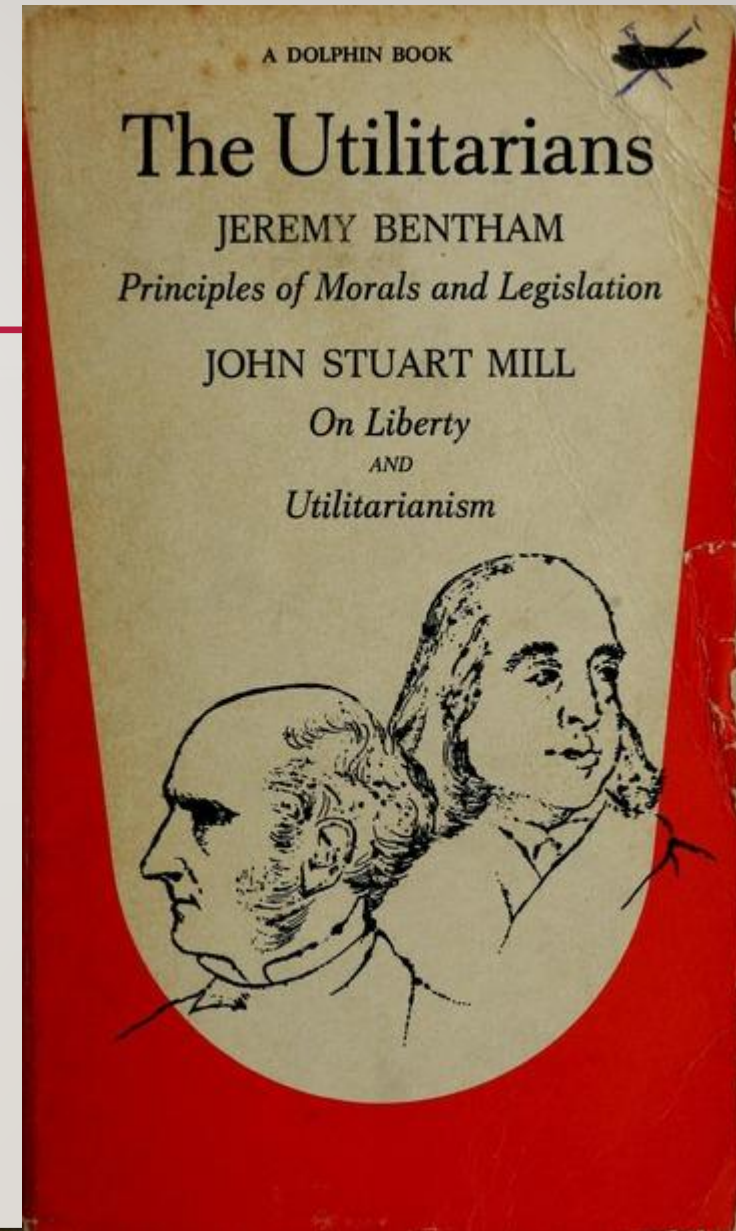
Rawls:

Utilitarianisme pada dasarnya tidak cukup untuk menerangkan persoalan keadilan sosial.



Tokoh Filsafat Moral Utilitarianisme

- Jeremy Bentham (1748–1832) merintis utilitarianisme dengan prinsip kegunaan (principle of utility), mengukur kesenangan melalui kalkulus hedonis.
- John Stuart Mill (1806–1873), muridnya menyempurnakannya dengan membedakan kesenangan rendah (fisik) dan tinggi (intelektual), serta menekankan kebebasan individu (hal. 61–62)

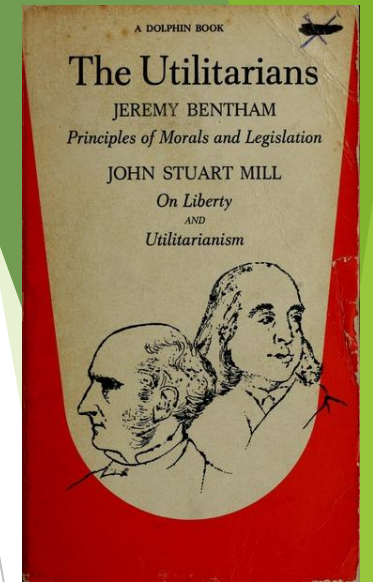


Prinsip Dasar

Berasal dari bahasa Latin utilitas atau utilis yang berarti berguna. Inti Ajaran: Menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kegunaannya dalam menghasilkan kebahagiaan.

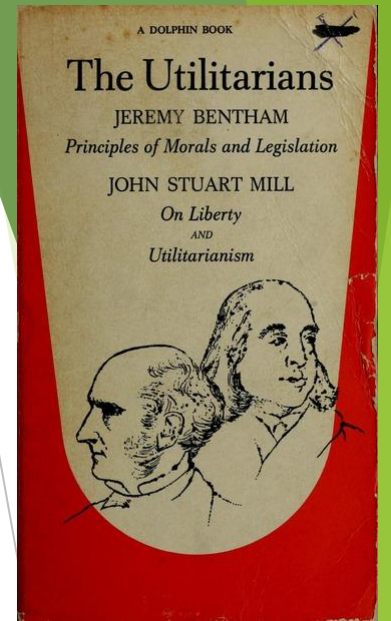
Parameter Kebenaran Moral: suatu tindakan dianggap benar secara moral jika memenuhi kriteria: *The Greatest Happiness for the Greatest Number*. tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang sebanyak mungkin. Landasan Psikologis (Subjektivitas Manusia): setiap manusia: menginginkan rasa nikmat (pleasure) & menghindari rasa sakit/penderitaan (pain).

Sifat teori: empiris. Penentuan benar atau salahnya suatu tindakan didasarkan pada pengalaman nyata dan dampak yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang terkena dampaknya, bukan berdasarkan wahyu Tuhan/aturan abstrak (hal.62-65)



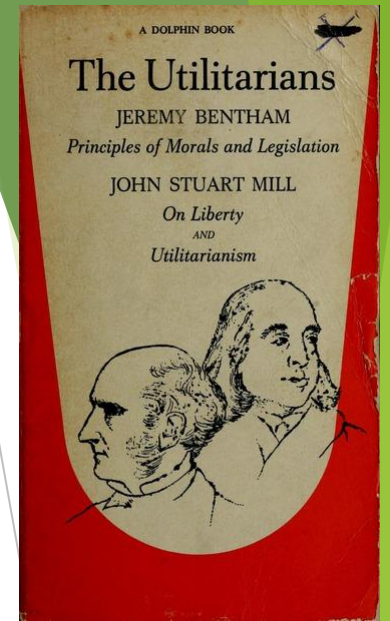
Daya Tarik Utilitarianisme

- ▶ Dalam tingkat individual, sangat masuk akal jika seseorang meyakini bahwa kepuasan dan kebahagiaan adalah tujuan yang dikejanya. Utilitarianisme tampil menjadi teori moralitas politik yang menarik karena: (1) kebahagiaan tidak bergantung pada Tuhan, atau jiwa dan hal metafisis. (2) penekanan tindakan pada hasil baik dan buruk. Persoalan moral bisa diselesaikan dalam cara pandang konsekuensialisme.
- ▶ Dalam konteks masyarakat: (1) utilitarianisme mengejar kesejahteraan. (2) masyarakat memiliki alat ukur menguji aturan moral dalam kerangka sebab-akibat yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat (hal.65-71)



Politik Utilitarianisme

- ▶ Suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral sejauh memaksimalkan kepuasan banyak orang.
- ▶ Kelompok utilitarianisme: egalitarian dan non egalitarian.
- ▶ Kelompok egalitarian: mengakui bahwa setiap orang penting dan sama-sama penting. Kepentingan mereka harus diberi bobot yang sama. Kesejahteraan akan lebih dimaksimalkan melalui distribusi kekayaan seluas-luasnya.
- ▶ Kelompok non-egalitarian: fokus pada "tujuan besar" atau agregat kesejahteraan total, bukan pada kesamaan bobot tiap individu. Aksi Politik: mendukung sistem pasar bebas (*laissez-faire*). Pertumbuhan ekonomi yang besar secara keseluruhan otomatis akan membawa kebaikan bagi semua, meskipun distribusinya tidak merata (hal.72-75)



Rawls VS Utilitarianisme

Rawls menunjukkan dua kelemahan fatal Utilitarianisme:

Penindasan terhadap Minoritas (Tyranny of the Majority).

Utilitarianisme hanya peduli pada "total kepuasan". Contoh:

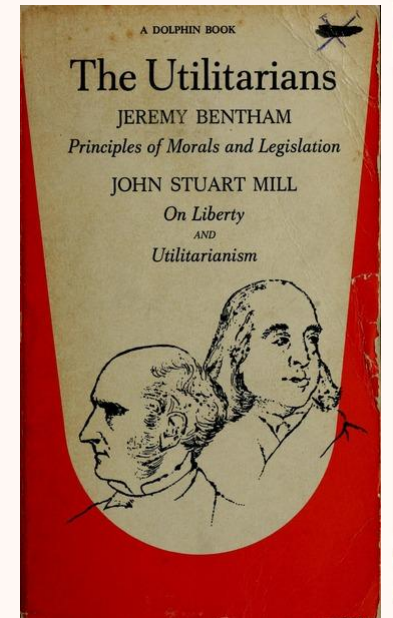
Jika mayoritas warga menolak pengungsi atau rumah ibadah minoritas demi ketenangan mereka, maka menurut

Utilitarianisme hal itu sah-sah saja. Keadilan tidak boleh

hanya menjadi produk sampingan (derivatif) dari kepuasan

maksimal. Hak-hak dasar individu tidak boleh dikalahkan

hanya karena mayoritas merasa lebih "puas" jika hak tersebut diabaikan.



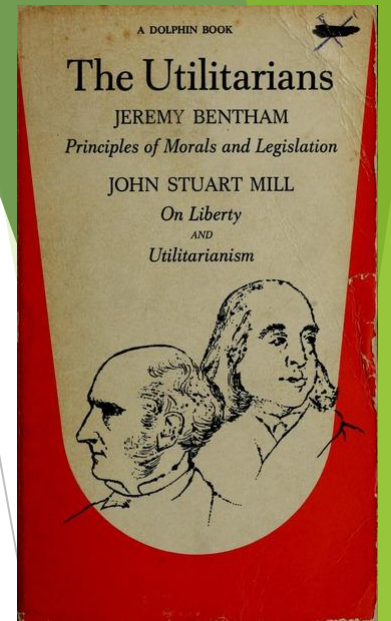
Rawls VS Utilitarianisme

Rawls menunjukkan dua kelemahan fatal Utilitarianisme:

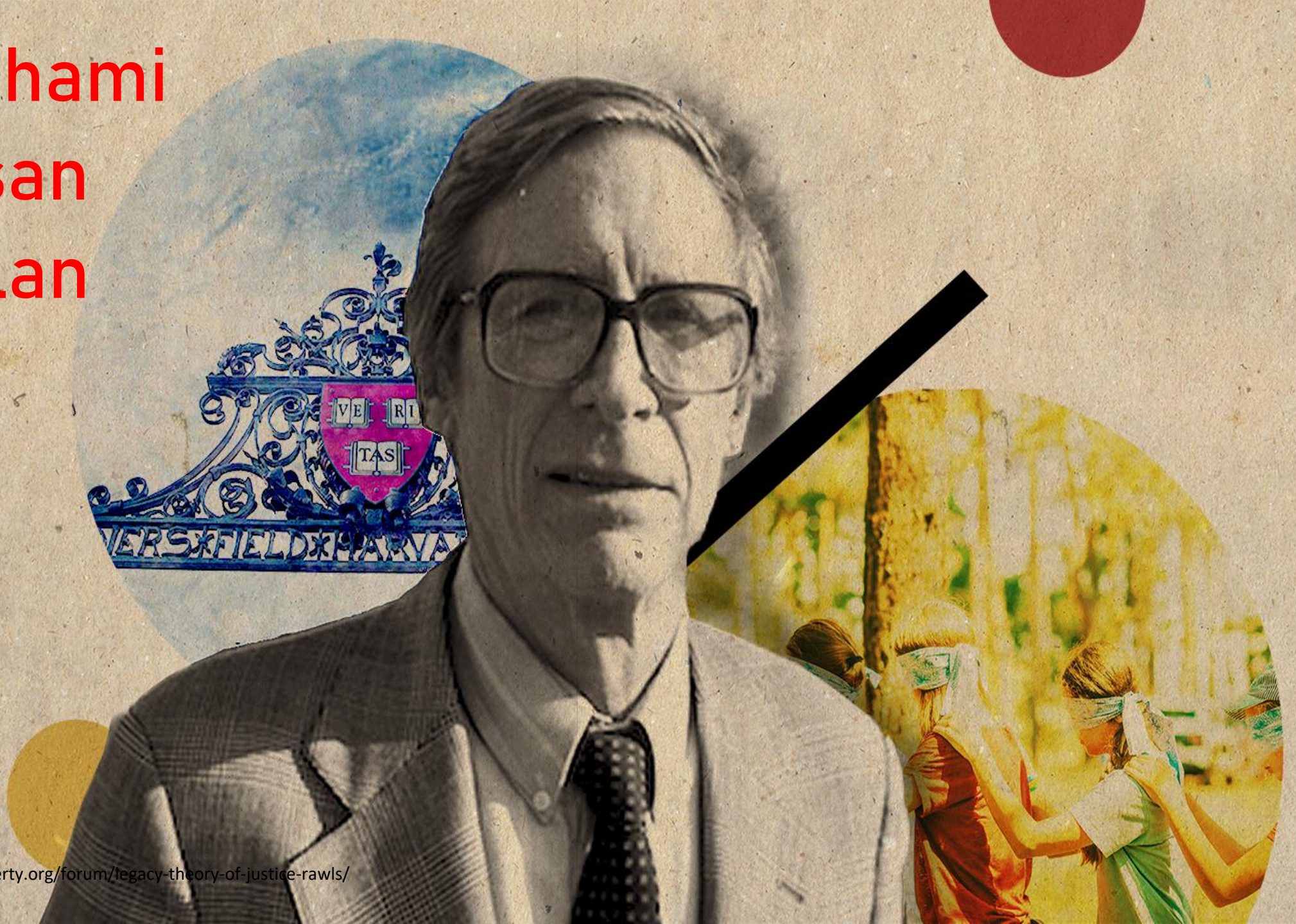
Masalah Distribusi: Utilitarianisme berfokus pada jumlah total, tetapi buta terhadap cara membaginya ke setiap orang secara adil. **Pertanyaan Rawls:** Bagaimana cara membagi "kepuasan" itu kepada setiap individu? Utilitarianisme seringkali gagal memberikan prosedur pembagian yang adil karena mereka hanya sibuk menghitung angka total kepuasan di akhir tanpa melihat proses distribusinya.

Cara mengatasi: perlu pengamat netral. Namun, bagaimana pengamat mengidentifikasi, menimbang imajinasi masyarakat?

Rawls: utilitarianisme tidak menganggap serius eksistensi manusia, menyepelekan perbedaan antara satu individu dengan lainnya.



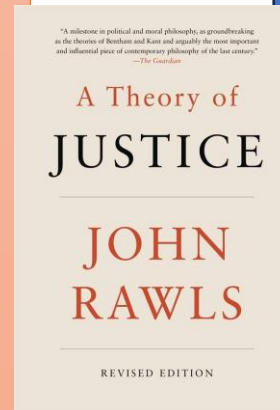
Memahami Gagasan Keadilan



Gambar: <https://lawliberty.org/forum/legacy-theory-of-justice-rawls/>

Keadilan Sebagai Keutamaan

- Keutamaan pertama dalam institusi sosial merujuk pada bagaimana masyarakat dikelola. Keadilan berkaitan dengan aturan main, prosedur, tindakan adil yang mau tidak mau harus dua arah.
- Kepatuhan adalah keutamaan. Mereka yang mendapat manfaat dari alam harus membayar pajak lebih besar sebagai “subsidi” bagi yang lemah. Kepatuhan yang dalam keadilan: gabungan dari moralitas asosiasi (kesepakatan) dan kepatuhan karena jaminan kebebasan kesetaraan (moralitas prinsip).
- Konteks keadilan: kondisi obyektif (kelangkaan sumber daya) dan subyektif (konflik kepentingan) (hal. 88-98)

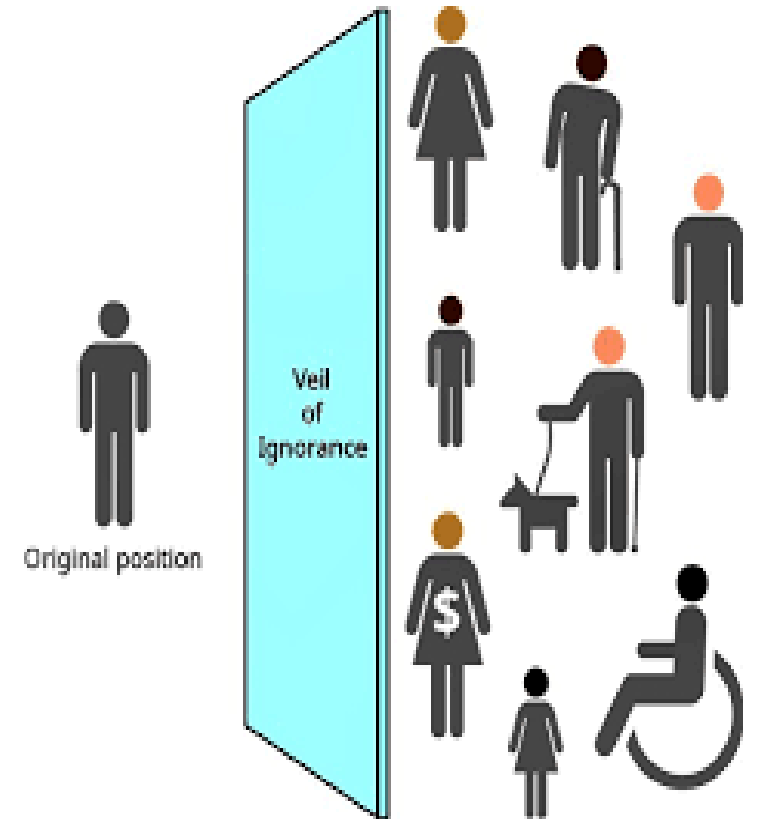


Keadilan Sebagai Teori (konstruksi prinsip dan kriteria)

- Prinsip: Penolakan terhadap Keadilan berbasis "Jasa/Kontribusi".
- Rawls menolak slogan keadilan tradisional seperti "masing-masing sesuai jasanya" atau "sesuai kontribusinya". Keadilan sebahai prinsip: dasar atau fondasi dalam memberikan penilaian moral.
- Kriteria: alat ukur yang lebih sistematis untuk menentukan apakah suatu prinsip bisa disepakati secara umum
- Teori keadilan: filosofis dan praktis. Mengklarifikasi apa yang kita pahami sebagai keadilan dan menunjukkan bagaimana klarifikasi tersebut membantu kita dalam menilai perilaku institusi-institusi sosial (hal.99-105)

Posisi Asali dan Gagasan Dasar Keadilan

Keadilan bukan dipahami dalam konteks individual, namun dalam dimensi moral dan sosial. Dalam dimensi sosial: aspek timbal balik. Dalam dimensi moral, keadilan mengedepankan ketidakberpihakan. Keadilan bukan melulu tentang kesepakatan rasional yang menguntungkan yang tertuang dalam pembentukan pemerintahan.



Posisi Asali (*justice as fairness*)

Status Hipotetis: Ini bukan kejadian sejarah nyata, melainkan situasi pengandaian di mana individu-individu bebas dan rasional berkumpul untuk menyepakati aturan dasar masyarakat.

Tirai Ketidaktahuan (Veil of Ignorance): Di dalam posisi ini, setiap orang berada di balik "tirai" yang membuat mereka tidak tahu identitas asli mereka (apakah mereka kaya/miskin, pintar/bodoh, mayoritas/minoritas, atau sehat/sakit). Dengan tirai ini, keputusan tidak bisa dipihak-kepandukan oleh kepentingan golongan tertentu, karena setiap orang membayangkan dirinya bisa jatuh pada posisi siapa pun: yang paling tinggi maupun yang paling rendah.

Tujuan: Dengan tidak diketahuinya nasib masing-masing, setiap orang akan terdorong untuk memilih prinsip yang paling adil dan aman bagi semua pihak, terutama bagi kelompok yang paling tidak beruntung, karena mereka takut nantinya akan menempati posisi tersebut.

Konsepsi keadilan: kebebasan, kesetaraan, ketersalingan, ketidakberpihakan (hal.109-120)

Posisi Asali dan Justifikasi

- Pendekatan kontrak sosial: untuk memilih dan menetapkan secara bersama-sama prinsip keadilan yang disepakati semua pihak.
- Ketidakberpihakan: menghidarkan dari kemelekatan.
- Kesetaraan: semua pihak memiliki hak yang sama.
- Keyakinan intuitif: apakah prinsip-prinsip yang dipilih sesuai dengan yang diyakini tentang keadilan?
- Titik keseimbangan: posisi asali dapat dijustifikasi dengan alasan-alasan mendasar dan masuk akal (hal. 120-126)

Prinsip-Prinsip Keadilan:

- Kontrak hipotesis (perjanjian yang hanya dibayangkan, tidak benar-benar terjadi) diutamakan dibandingkan kontrak aktual (perjanjian yang benar-benar terjadi dan diikat secara nyata)
- Prinsip keadilan: (1) kebebasan (Hak asasi (bicara, agama, politik) bersifat mutlak dan tidak bisa ditukar dengan materi) (2) kesetaraan (Setiap orang harus punya peluang yang sama untuk sukses, tanpa peduli ia lahir kaya atau miskin). (3) perbedaan (Ketimpangan ekonomi hanya boleh ada jika hal itu membantu orang yang paling miskin menjadi lebih baik) → pajak tinggi bagi yang mendapat manfaat sumber daya (hal. 126-141)

Kritik Sandel

Rawls terlalu fokus pada prosedur yang dingin dan abstrak, sehingga melupakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya bermakna karena nilai-nilai bersama, bukan sekadar kontrak (hal. 167-169)

Jawaban Rawls:

- Rawls setuju bahwa manusia punya identitas sosial/moral yang dalam (seperti kata Sandel). Namun, ia menegaskan bahwa dalam politik, kita harus bertindak "seolah-olah" terlepas dari identitas itu agar bisa bersikap adil kepada warga lain yang berbeda keyakinan.
- Negara harus tetap netral dan hanya fokus pada prosedur hukum yang disepakati bersama (hal.174-176)



Memikirkan Ulang Hidup Bersama Menurut Andi Tarigan

- Masyarakat sebagai komunitas politik, yang terdiri atas sejumlah orang dengan segala ragam perbedaan dan latar belakangnya, dapat dikelola dan diselenggarakan dengan cara terbaik jika, dan hanya jika, setiap orang yang menjadi bagiannya memiliki kemampuan epistemik untuk melepaskan diri dari segala kecenderungan, keinginan, kepentingan, dan kehendaknya, untuk kemudian secara bersama-sama menyepakati prinsip-prinsip keadilan yang bebas dari konsepsi moralitas tertentu. Keadilan sosial dapat tercapai jika prinsip kebebasan dan kesetaraan dijalankan bersamaan.
- Dalam konteks masyarakat digital, ketidak setaraan akan meningkat. Seseorang yang tidak menggunakan perangkat digital akan tersingkir.
- Mampukah kita sebagai masyarakat dengan aneka perbedaan melepaskan diri dari segala kecenderungan, keinginan, kepentingan, dan kehendak, untuk kemudian secara bersama-sama menyepakati prinsip-prinsip keadilan dalam hidup bersama? (hal. 179-191)

Tanggapan

- Apresiasi untuk karya Andi Tarigan. Tulisan ini merupakan pengembangan pemikiran dari Tesis berjudul “Tumpuan Keadilan” di STF Driyarkara Jakarta. Berpijak dari tesis, buku ini kaya dengan data dan analisis ilmiah. Kekayaan lain dari buku ini adalah pada referensi buku yang berasal dari sumber-sumber pertama.
- Andi Tarigan melakukan pembedahan terhadap pemikiran Rawls dengan sangat baik. Ia memaparkan kajian teoritik sekaligus mendaratkan dengan contoh-contoh relevan dalam konteks Indonesia. Tentu saja, contoh-contoh yang diketengahkan di sekitar tahun 2017 atau sebelumnya, saat tulisan ini digumulkan oleh Andi Tarigan bersama pembimbing akademisnya.

Buku ini diakhiri dengan pertanyaan yang menantang (hal. 191). Berpijak dari pemikiran Andi Tarigan tersebut, saya merasa tertantang untuk mengulik teori Rawls dalam konteks saat ini.

- Relevansi “Posisi Asali” dalam kebijakan publik. Idealnya, kebijakan publik dijalankan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan tanpa memandang apa latar belakang seseorang. Hal tersebut termaktub dalam konstitusi Republik Indonesia. Namun dalam praktik, kebijakan publik ditentukan oleh oligarki dan sangat sektarian. Sekiranya pembuat kebijakan menggunakan “veil of ignorance”, pembuat kebijakan bukan untuk kepentingan tertentu yang sifatnya populis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa populisme politik merusak demokrasi (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, 2025).
- Prinsip perbedaan. Rawls mengandaikan bahwa ketimpangan ekonomi hanya boleh ada jika hal itu membantu orang yang paling miskin menjadi lebih baik melalui pajak. Dalam praktik di Indonesia, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kebijakan yang mestinya diberikan untuk orang miskin kerap menjadi “bancakan” pemilik kuasa dan golongannya.
- Kesetaraan peluang: realitas di lapangan menunjukkan banyaknya ketimpangan. Jurang ketimpangan semakin lebar (katadata.co.id, 2025).
- Dikaitkan dengan “justice as fairness”, masih banyak PR Indonesia.

Pemikiran Rawls dalam dialog dengan Iman Kristen:

- “Option for the poor” merupakan perjumpaan antara pemikiran Rawls dan kekristenan. Hak-hak kepada yang miskin, lemah, dan tertidas harus diberikan. Bahwa terdapat perbedaan latar belakang pemikiran, namun puncak pada "Preferential Option for the Poor" menunjukkan hadirnya tanda-tanda Kerajaan Allah dalam filsafat politik.
- Prinsip pertama Rawls tentang Kebebasan Dasar yang Sama sejalan dengan pandangan Kristen tentang martabat manusia sebagai Imago Dei (Gambar Allah).
- Pengikut Kristus diundang berdialog dengan realitas masa kini dengan berpijak pada ajaran Alkitab dan menggunakan filsafat keadilan sebagai pisau analisis.
- Siapa pun yang mau terlibat mewujudkan hidup bersama yang adil diundang berperan serta sesuai dengan bidangnya masing-masing